



Pusaran Kemiskinan Struktural Di Pasar Nalo, Pademangan, Jakarta Utara

Melisa Nurjaya¹, Suci Trianjani², Nabila Karimah³, Amudi Panigori⁴,
Devyta Ardyaning⁵, Ranti Angelina⁶, Farah Fasya⁷, Jeremy
Pangihutan Benaya⁸, Ahmad Hidayatullah⁹, Yuliana Yuli¹⁰, Mulyadi¹¹,
Suprima¹², RM. Andreas Bramantyo¹³, Ronald Manulu¹⁴

Ilmu Hukum Program Sarjana, Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Abstract

Received: 07 Juni 2024
Revised: 13 Juni 2024
Accepted: 22 Juni 2024

Poverty is a problem faced by all countries in the world, especially in developing countries like Indonesia. Poverty results from the inability of some people to organize their lives at a humane level. This situation causes a decline in the quality of human resources which has an impact on decreasing creativity and income. Because people with low incomes are unable to access education, the cycle of poverty continues which can result in a decline in the quality of human resources intellectually and physically leading to low productivity. The aim of the research to be achieved is as a step to provide better insight into the factors that cause poverty and how to overcome structural poverty through appropriate social and economic policies. In this research, researchers used a qualitative approach method in the form of information obtained through interviews and observations. Researchers found several main factors causing structural poverty, namely, economic level, education level, access to health services, and other social factors. Whatever the cause, the problem of structural poverty is still a major problem that requires real attention and action through the implementation of rescue, empowerment and facilitative

Keywords: *Structural Poverty, Economic Level, Generation, Education Level*

(*) Corresponding Author: ¹2310611232@mahasiswa.upnvj.ac.id; ²2310611201@mahasiswa.upnvj.ac.id; ³2310611206@mahasiswa.upnvj.ac.id; ⁴2310611213@mahasiswa.upnvj.ac.id; ⁵2310611218@mahasiswa.upnvj.ac.id; ⁶2310611226@mahasiswa.upnvj.ac.id; ⁷2310611234@mahasiswa.upnvj.ac.id; ⁸2310611239@mahasiswa.upnvj.ac.id; ⁹ahmadhidayatullah62@gmail.com; ¹⁰yuli@upnvj.ac.id; ¹¹suprima@upnvj.ac.id; ¹²mulyadi@upnvj.ac.id; ¹³ronaldmanalu@upnvj.ac.id; ¹⁴andreasbramantyo@upnvj.ac.id.

How to Cite: Nurjaya, M., Trianjani, S., Karimah, N., Panigori, A., Ardyaning, D., Angelina, R., Fasya, F., Benaya, J., Hidayatullah, A., Yuli, Y., Mulyadi, M., Suprima, S., Bramantyo, R., & Manulu, R. (2024). Pusaran Kemiskinan Struktural Di Pasar Nalo, Pademangan, Jakarta Utara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(11), 418-429. <https://doi.org/10.5281/418-429>

PENDAHULUAN

Kemiskinan hampir terjadi di beberapa negara pada seluruh penjuru dunia. Indonesia merupakan salah satu negara yang tingkat kemiskinannya cukup tinggi dalam hal kelangsungan hidup masyarakatnya. Kemiskinan tidak hanya mengacu pada kerugian ekonomi saja, tetapi juga mengacu pada tidak terpenuhinya berbagai hak mendasar, seperti dalam hal pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang bermartabat (Manurung dkk., 2015). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 dijelaskan bahwa kemiskinan merupakan suatu keadaan sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak dihormati hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Permasalahan kemiskinan di Indonesia dapat terjadi di wilayah pedesaan dan perkotaan. Namun, jumlah penduduk miskin di wilayah pedesaan

relatif lebih tinggi dibandingkan pada wilayah perkotaan. Kemiskinan bukanlah hal yang baru antara individu dan masyarakat. Namun kemiskinan sudah berlangsung lama, seperti krisis mata uang pada tahun 1997 di Indonesia. Krisis moneter yang terjadi saat itu menyebabkan kesulitan perekonomian bagi masyarakat Indonesia.

Saat ini, berdasarkan data statistik mengenai kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah masyarakat yang mengalami kemiskinan di Jakarta per Maret 2023 berjumlah 477.830 jiwa. Jumlah tersebut turun 3,46% dibandingkan September 2022 yang tercatat sebanyak 494.930 jiwa. Menurunnya angka kemiskinan di Jakarta disebabkan oleh perekonomian ibu kota Indonesia yang tumbuh sebesar 4,95% (year-on-year/yoy) pada kuartal I tahun 2023. Persentase tersebut lebih tinggi dibandingkan kuartal sebelumnya sebesar 4,85% (year-on-year/yoy). Studi yang dilakukan Pratiwi dkk. (2023) mengenai tingkat kemiskinan di Kota Medan memberikan hasil bahwa meskipun Pemerintah Kota Medan selalu memberikan langkah untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dengan maksimal ternyata kemiskinan kerap menjadi permasalahan yang genting. Mengingat dalam mengatasi kemiskinan memerlukan upaya dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan dan program pembangunan dari berbagai sektor. Namun, faktanya pembangunan yang tidak merata turut menyumbang angka kemiskinan di Kota Medan.

Kemiskinan struktural juga terjadi di wilayah Jakarta, khususnya wilayah Pasar Nalo, Pademangan, Jakarta Utara. Kemiskinan dapat mengganggu setiap aspek kehidupan seseorang yang akan mempengaruhi kelangsungan hidup seseorang. Kemiskinan struktural bukan hanya persoalan pendapatan tetapi juga persoalan akses dan peluang. Upaya untuk mengatasi kemiskinan struktural harus melibatkan perubahan struktur ekonomi dan sosial yang ada. Kemiskinan struktural yang terjadi di wilayah Pasar Nalo dapat dilihat dari kurangnya pendidikan yang memadai, pekerjaan berupah rendah, akses terhadap pelayanan kesehatan yang tidak merata, kondisi pemukiman yang tidak layak, dan taraf ekonomi yang rendah. Adapun cara untuk mengatasi kemiskinan struktural yaitu dengan bentuk keterlibatan pemerintah dan kebijakan pemerintah dalam upaya mengentaskan kemiskinan struktural. Siklus kemiskinan struktural membuat individu atau kelompok masyarakat sulit untuk keluar, atau bahkan terjebak dalam lingkaran kemiskinan tersebut, sehingga berdampak negatif pada generasi mendatang. Hal ini ditunjukkan dengan kemiskinan struktural yang terjadi di Jakarta, seperti di kawasan Pasar Nalo, Pademangan, Jakarta Utara. Secara umum, masyarakat di kawasan Pasar Nalo yang terjebak dalam siklus kemiskinan struktural karena kurang mendapat edukasi mengenai upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah. Oleh karena itu, mereka akan terus terjerumus dalam kemiskinan struktural.

Berdasarkan latar belakang dan data-data yang sudah dipaparkan diatas, peneliti paparkan di atas, mendorong peneliti untuk melakukan penelitian mengenai "Pengentasan Pusaran Kemiskinan Struktural di Pasar Nalo, Pademangan, Jakarta Utara". Tujuan penelitian ini merupakan upaya guna mengidentifikasi dan menganalisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor struktural yang menyebabkan kemiskinan dalam masyarakat. Penelitian ini juga turut beniat

untuk memberikan wawasan yang lebih baik tentang cara mengatasi kemiskinan struktural melalui kebijakan sosial dan ekonomi yang tepat.

Sebuah studi oleh Pinem dkk. (2019) disajikan dalam penelitian bertajuk “Kemiskinan Struktural di Perkampungan Nelayan di Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bungkulu”. Kajian ini menemukan bahwa ciri-ciri kemiskinan struktural yang terjadi di Kecamatan Sumber Jaya terlihat dari kondisi permukiman kumuh dan kondisi para buruh nelayan yang sebagian besar tinggal di rumah kontrakan. Akses terhadap layanan kesehatan bagi nelayan sangat buruk sehingga tidak semua nelayan memiliki kartu BPJS kesehatan. Dengan kata lain, distribusi BPJS kesehatan masih belum merata. Rata-rata tingkat pendidikan nelayan adalah minimal SMP, dan banyak anak-anak nelayan yang tidak melanjutkan ke pendidikan tinggi.

Kemudian, Iqbal (2023) dalam penelitiannya yang berjudul “Kemiskinan Struktural dan Mekanisme Survival Tukang Becak di Terminal Bratang”. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa kemiskinan struktural tukang becak di Terminal Bratang, Surabaya. Pendapatan atau upah mereka tidak melebihi ambang batas kemiskinan rata-rata nasional yang ditetapkan. Kemiskinan tukang becak semakin dipupuk karena mereka tidak bisa beralih ke pekerjaan lain untuk membawa mereka ke nasib yang lebih baik. Penyebabnya karena tingkat pendidikan mereka yang rendah, tidak mempunyai keterampilan lain dan pengetahuan yang terbatas selain menjadi pengayuh becak.

Dari berbagai penelitian terdahulu, peneliti merasa perlu diadakan penelitian lanjutan untuk menguatkan penelitian sebelumnya. Salah satunya, peneliti ingin menjabarkan lebih lanjut terkait faktor-faktor kemiskinan struktural dan upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan struktural. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menguatkan penelitian sebelumnya dan menjadi terobosan baru untuk memahami bagaimana pusaran kemiskinan struktural ditindaklanjuti.

TINJAUAN PUSTAKA

Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan. Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (2016) mendefinisikan kemiskinan dari sudut pandang ekonomi yang diukur dari pengeluaran sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pokok makanan dan non-makanan. Menurut Kunchoro (dalam Tyas, 2016), kemiskinan adalah ketidakmampuan mencapai taraf hidup minimum. Kita dapat menyimpulkan bahwa kemiskinan adalah suatu keadaan dimana seseorang atau suatu masyarakat tidak mampu menjalani kehidupan yang lebih layak atau meningkatkan taraf hidupnya.

Prayoga dkk. (2021) menyatakan bahwa kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain upah minimum yang tidak memadai, standar hidup yang buruk, dan tingkat pengangguran yang meningkat setiap tahun tanpa adanya tambahan kesempatan kerja. Todaro dan Stephen (2014) menjelaskan bahwa upah minimum diciptakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sehingga mengurangi kemiskinan. Taraf hidup masyarakat ditunjukkan dengan meningkatnya kualitas pengetahuan, keterampilan, dan bakatnya. Pangiuk (2018) menjelaskan bahwa dengan pertumbuhan ekonomi, tercapailah kebaikan bersama

melalui berbagai pembangunan sosial dan ekonomi untuk mengatasi permasalahan kemiskinan. Terbatasnya jumlah lapangan kerja yang tersedia menjadi penyebab utama terjadinya pengangguran dan berdampak langsung pada tingginya angka kemiskinan (O'Campo et al., 2015).

Menurut Selo Soemadjan, **kemiskinan struktural** adalah kemiskinan sekelompok masyarakat akibat ketidakmampuan struktur sosial dalam memanfaatkan sumber pendapatan yang ada. Menurut pendekatan struktural, faktor penyebabnya terletak pada kendala struktural sosial, artinya individu tersebut tidak mempunyai keinginan meningkatkan taraf hidupnya. Struktur sosial yang dominan menimbulkan faktor penghalang mereka untuk maju. Misalnya, tidak dapat memperoleh pendidikan dikarenakan kelemahan ekonomi sehingga terus terjatuh dalam pusaran kemiskinan struktural tersebut (Suyanto, 2013).

Bantuan sosial (bansos) merupakan pemberian kompensasi sementara dan selektif oleh pemerintah atau organisasi kepada individu, keluarga, komunitas, dan masyarakat umum dalam bentuk sumbangan atau barang. Selektif tersebut bertujuan untuk melindungi kemungkinan risiko ancaman sosial (Sitanggang dkk., 2014).

Tingkat ekonomi adalah sebagai upaya memakmurkan dan mensejahterakan serta memperkuat struktur perekonomian daerah dan nasional. Artinya, pertumbuhan ekonomi mengacu pada seberapa banyak tambahan pendapatan yang dihasilkan aktivitas ekonomi dalam jangka waktu tertentu. Dengan itu dapat dikatakan tumbuhnya perekonomian jika pendapatan riil masyarakat pada tahun selanjutnya lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya (Hendra, 2012).

Sumber daya manusia menurut Hasibuan (2012) menegaskan bahwa adalah Kemampuan berpikir dan kekuatan fisik yang dimiliki individu. Perilaku dan karakteristik nya ditentukan oleh genetik dan lingkungan. Kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan dengan menyediakan berbagai fasilitas yang menunjang kesejahteraan, serta pelatihan. Pemahaman tentang kualitas sumber daya manusia yang dijelaskan oleh ahli didasarkan pada buku Raharjo Lang (2012) "Intelektual, Intelegensia dan perilaku politik Bangsa" Kualitas sumber daya manusia tidak hanya ditentukan oleh aspek seperti keterampilan dan kemampuan saja. Hal ini ditentukan tidak hanya oleh kebugaran fisik saja, tetapi juga oleh tingkat pelatihan, pengetahuan, pengalaman, dan kedewasaan. Menurut Soekidjo Notoatmodjo Lang (2012) dalam buku "Pengembangan Sumber Daya Manusia" disebutkan bahwa kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan kemampuan kerja, pola pikir dan keterampilannya.

Tingkatan pendidikan menurut Lestari dalam Wirawan (2016) adalah kegiatan individu untuk mengembangkan keterampilan, sikap, dan bentuk perilaku untuk kehidupan masa depan melalui suatu organisasi tertentu maupun non-organisasi. Tujuan pendidikan tertuang dalam Undang- Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan. Pasal 3. menyatakan bahwa peranan pendidikan nasional adalah mengembangkan keterampilan, membentuk budi pekerti dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan tujuan mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat,

berilmu, berakhlak mulia, kompeten, kreatif, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab.

Tingkat kesejahteraan menurut Sunarti (2012), kesejahteraan adalah suatu sistem kehidupan sosial, material, dan spiritual yang dipenuhi perasaan aman, bermartabat, dan damai baik internal maupun eksternal, yang di dalamnya seluruh warga negara membantu memenuhi kebutuhan pribadi dan memenuhi kebutuhan sosial dan menjadikan masyarakat sebaik mungkin. Terdapat beberapa indikator yang menunjukkan (1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk peningkatan pendapatan secara kuantitatif. (2) Meningkatkan kualitas kesehatan keluarga. (3) adanya investasi ekonomi keluarga dalam bentuk tabungan (Imron, 2012). Meskipun tidak ada definisi substantif yang tegas, tingkat manfaat juga diperluas, termasuk gizi, pendidikan, dan kesehatan, dan sering kali mencakup inisiatif perlindungan sosial lainnya seperti kesempatan kerja, asuransi kesehatan, perlindungan bagi lansia, dan pengentasan kemiskinan.

Pelayanan kesehatan Pelayanan kesehatan merupakan suatu bentuk usaha yang bertujuan untuk mencegah dan mengobati penyakit. Bertujuan untuk mewujudkan masyarakat sehat, segala upaya dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan dan memulihkan kesehatan dilakukan oleh tenaga medis profesional. Tujuan pelayanan kesehatan adalah untuk mencapai tingkat kesehatan masyarakat (kepuasan konsumen) yang memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat melalui efektivitas pelayanan yang diberikan oleh penyedia layanan (pemasok) harapan dan kebutuhan. kepuasan). Layanan disampaikan secara efektif dalam organisasi (Wulandari, 2016).

METODE PENELITIAN

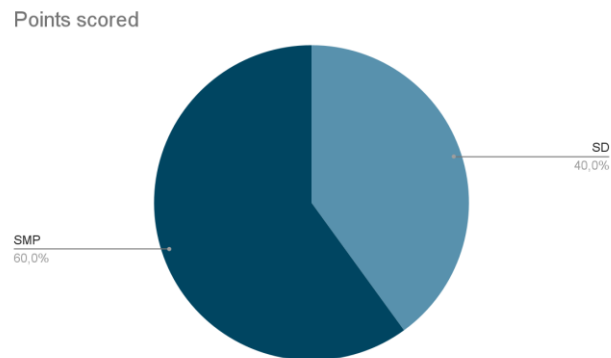
Dalam penelitian pada fenomena ini, kami memilih menggunakan metode pendekatan kualitatif berupa wawancara dan observasi di Pasar Nalo, Pademangan, Jakarta Utara yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2023. Pemilihan lokasi dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut merupakan kawasan yang sebagian besar masyarakatnya memiliki taraf kehidupan yang rendah. Sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara dan pengamatan langsung dilapangan dengan dokumentasi berupa foto dan video.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pusaran kemiskinan struktural yang terdapat di Pasar Nalo, Pademangan, Jakarta Utara, merupakan salah satu fenomena kemiskinan struktural yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara serta kegiatan observasi langsung ke Pasar Nalo, didapatkan bahwasannya beberapa warga Pasar Nalo masih mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kesulitan yang dialami warga Pasar Nalo dapat dilihat dari segi upah, pengeluaran kebutuhan pokok, bantuan yang diberikan oleh pemerintah, dan lain-lain. Selain itu, kemiskinan struktural yang terjadi di kawasan Pasar Nalo pun turut disebabkan oleh kualitas tingkat pendidikan warga yang rendah serta masih terdapat beberapa generasi dari suatu keluarga yang enggan untuk melanjutkan wajib belajar hingga 12 tahun.

Tingkat Pendidikan Warga Pasar Nalo



Gambar 1. Tingkat Pendidikan Warga Pasar Nalo
Sumber: (Warga Pasar Nalo, 2023)

Pendapatan Perbulan Warga Pasar Nalo

Dalam hal ini, peneliti memberikan pertanyaan secara mendalam mengenai pendapatan perbulan warga Pasar Nalo dimulai dari narasumber pertama yang bernama Ibu Yenti. Ibu Yenti memberikan pernyataan bahwa ia tidak memiliki pendapatan bulanan dikarenakan saat ini ia sudah tidak bekerja sehingga, ia mengandalkan biaya kehidupan sehari-hari dari bantuan yang pemerintah berikan. Kemudian, narasumber kedua yang bernama Ibu Saodah turut menjelaskan bahwasanya ia tidak memiliki pekerjaan dan pendapatan bulanan sehingga untuk kebutuhan sehari-harinya ditanggung oleh anak dan menantu yang bekerja. Selanjutnya, narasumber ketiga yaitu Ibu Saeni menjelaskan bahwa ia tidak memiliki pekerjaan dan pendapatan bulanan dikarenakan kondisinya yang tunanetra. sehingga, Kebutuhan sehari-hari Ibu Saeni ditanggung oleh anak-anaknya yang juga tinggal bersamanya. Kemudian, narasumber keempat yaitu Bapak Ujang. Pekerjaan yang dilakoni oleh Bapak Ujang yaitu sebagai tukang urut dengan penghasilan perbulan tidak menentu. Bapak ujang menjalankan pekerjaannya dengan sukarela, jadi ia tidak menentukan harga kepada setiap orang yang diurutnya sehingga, penghasilan yang biasanya Bapak Ujang dapatkan sekitar Rp. 50.000 per hari atau sekitar Rp. 1.500.000 per bulan. Selanjutnya, narasumber terakhir yaitu Ibu Sumarsih. Ibu Sumarsih memiliki usaha warung kecil kecilan, ia hidup bersama satu orang anaknya yang tidak memiliki pekerjaan tetap. penghasilan yang Ibu Sumarsih dapatkan dari warung sekitar Rp. 60.000 per hari atau sekitar Rp. 1.800.000 per bulan. Dari hasil penelitian yang ditinjau dari pendapatan perbulan warga Pasar Nalo maka dapat diketahui bahwa pendapatan perbulan masyarakat Pasar Nalo masih dibawah batas minimum pendapatan wilayah tersebut.

Bantuan Pemerintah Terhadap Warga Pasar Nalo

Dalam hal ini, peneliti memberikan pertanyaan secara mendalam mengenai bantuan pemerintah yang didapatkan warga Pasar Nalo dimulai dari narasumber pertama yaitu Ibu Yenti. Ibu Yenti menyatakan bahwa ia mendapatkan bantuan pemerintah berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) yaitu bantuan lansia sebesar 300-600 ribu per 2 bulan. Kemudian, narasumber kedua yang bernama Ibu Saodah turut menjelaskan bahwasanya ia tidak mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah. Selanjutnya, narasumber ketiga yaitu Ibu Saeni

menjelaskan bahwa ia mendapatkan pemerintah berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) yaitu bantuan lansia sebesar 300 ribu per 2 bulan. Kemudian, narasumber keempat yaitu Bapak Ujang menyatakan bahwa ia tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Selanjutnya narasumber terakhir yaitu Ibu Sumarsih menjelaskan bahwa mendapatkan bantuan lansia 600 ribu per 2 bulan. Dari hasil penelitian yang ditinjau dari bantuan pemerintah terhadap warga Pasar Nalo ditemukan bahwasanya bantuan pemerintah masih tidak merata.

Program BPJS Kesehatan Terhadap Warga Pasar Nalo

Dalam hal ini, peneliti memberikan pertanyaan secara mendalam mengenai bantuan BPJS kesehatan oleh pemerintah untuk warga Pasar Nalo dimulai dari narasumber pertama yaitu Ibu Yenti. Ibu Yenti tidak mendapatkan bantuan berupa BPJS Kesehatan. Selanjutnya narasumber kedua yaitu Ibu Saodah, dalam kehidupan sehari-harinya ia juga turut tidak mendapatkan bantuan BPJS Kesehatan dari pemerintah. Kemudian terdapat narasumber ketiga yaitu Ibu Saeni, ia mendapatkan bantuan BPJS Kesehatan dari pemerintah yang tidak dibebani biaya (gratis). Selanjutnya narasumber keempat yaitu Bapak Ujang, beliau juga turut mendapatkan bantuan BPJS Kesehatan. Kemudian, narasumber yang terakhir yaitu Ibu Sumarsih, ia turut mendapatkan bantuan pemerintah berupa BPJS Kesehatan yang tentunya memudahkan akses pelayanan kesehatan. Dari hasil penelitian yang ditinjau dari bantuan pemerintah berupa BPJS Kesehatan maka dapat disimpulkan bahwa beberapa warga Pasar Nalo masih belum mendapatkan bantuan pemerintah berupa BPJS Kesehatan.

PEMBAHASAN

Klausa Upah Rendah terhadap Kemiskinan Struktural

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sekitar 13,1 juta pekerja mendapat upah rendah sepanjang tahun 2020. Jumlah tersebut setara dengan 27,96% dari total jumlah pegawai yang sebanyak 46,7 juta orang. Menurut Islam, upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja untuk menghasilkan kekayaan. Dalam bahasa Al-Qur'an disebut dengan Ujrah. Ujrah yang diberikan kepada pekerja dalam bentuk imbalan (al-shawab) dan diterima baik di dunia maupun di akhirat. Pahala yang diterima manusia di akhirat sepenuhnya merupakan hak prerogatif Allah, dan dalam konteks ini disebut pahala (Ajrun) (Harahap dkk., 2017).

Upah minimum adalah upah minimum, yang ditetapkan berdasarkan kontrak atau peraturan hukum, dinyatakan atau diukur dalam bentuk uang, sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja atas pekerjaan atau jasa yang dilakukan atau diberikan, termasuk tunjangan kepada pekerja, untuk dirinya dan keluarganya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, tidak semua responden mempunyai pekerjaan formal dengan gaji yang sangat rendah, berkisar antara Rp. 500.000 hingga Rp. 1,5 juta, jauh dari upah minimum yang ditetapkan pemerintah

Pada hakikatnya, upah rendah berpengaruh terhadap keberlangsungan masyarakat dan menjadi salah satu faktor utama terjadinya fenomena kemiskinan struktural di Indonesia. Pandangan agama Kristen terhadap kemiskinan struktural cenderung mendorong umatnya untuk berperan aktif dalam membantu sesama dan memperjuangkan keadilan sosial. Prinsip kasih, keadilan, dan kepedulian terhadap orang miskin sangat ditekankan dalam ajaran Kristen. Meskipun tidak ada

pandangan tunggal, banyak Kristen meyakini bahwa mereka memiliki tanggung jawab moral untuk melibatkan diri dalam upaya mengatasi ketidaksetaraan struktural dan membantu orang-orang yang kurang beruntung.

Kesenjangan Sosial tempat tinggal yang layak

Kesenjangan sosial adalah suatu keadaan ketidakseimbangan dan perbedaan sosial dalam masyarakat. Masalah kesenjangan sosial merupakan ketidakseimbangan antara elemen masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. (Rusmaniah dkk., 2021). Kesenjangan ini seringkali dikaitkan dengan bentuk kesenjangan yang sangat nyata yang terwujud dalam aspek perekonomian masyarakat, misalnya kekayaan.

Salah satu bentuk kesenjangan sosial yang terlihat berupa tempat tinggal/rumah yang tidak layak huni di beberapa daerah dengan konstruksi bangunan dan dibangun di tempat yang membahayakan, kurangnya pencahayaan alami dan sirkulasi udara yang kurang baik.

Pengaruh Peningkatan Sumber Daya Manusia terhadap Tingkat Ekonomi

Tingkat ekonomi adalah suatu peningkatan mengenai kesejahteraan dan penguatan struktur perekonomian baik wilayah maupun nasional. Hal ini mengacu pada pertumbuhan ekonomi dan menunjukkan berapa banyak pendapatan tambahan yang dihasilkan aktivitas ekonomi selama periode waktu tertentu. Sebagai bagian dari upaya peningkatan perekonomian masyarakat di kawasan Pasar Nalo, hal ini dapat dilakukan melalui program pengembangan sumber daya manusia berupa pembinaan beserta dukungan pelatihan keterampilan di bidang teknis tertentu oleh pemerintah daerah dan perusahaan. Pengembangan dapat dicapai dengan terus memberikan penyuluhan beserta bimbingan yang disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan.

Pandangan Agama Katolik terhadap kemiskinan ini sudah tertulis melalui ajaran sosial gereja katolik yang membahas tentang kemiskinan ini, ajaran sosial tersebut adalah *Quadragesimo Anno* yang membahas tentang rekonstruksi tata sosial, tata masyarakat, dan juga membahas tentang tatanan ekonomi, dan Alkitab juga mengatakan “Sebab itu janganlah kamu kuatir dan berkata: Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu, bahwa kamu memerlukan semuanya itu.” (Matius 6: 31-32)

Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap TPAK

Peranan pendidikan sangat penting dalam kehidupan. Pendidikan adalah tentang mengembangkan kemampuan melalui perolehan ilmu, karena ilmu yang dimiliki memungkinkan anda menyampaikan ilmu tentang mata pelajaran yang dipelajari. Pendidikan menjadi sarana untuk memajukan suatu negara. Sebab, pendidikan berkaitan dengan pengembangan masyarakat. Oleh karena itu, untuk mencapai kekayaan hidup, pendidikan masyarakat harus dimajukan. Hal ini disebabkan karena pendidikan yang rendah membatasi perkembangan seseorang dan tingkat pendidikan yang rata-rata membuat sulit bersaing di dunia kerja (Azizah dkk., 2018).

Peran pendidikan juga untuk penanaman nilai-nilai. Khususnya mengenai filosofi pendidikan berdasarkan pendekatan sistem formal (Hadi dkk., 2014). Perlunya menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai dan sikap bela negara.

Terutama di kalangan generasi bangsa melalui mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pengajaran nilai-nilai bela negara diharapkan dapat tertanam dalam jiwa mahasiswa dan berkembang dengan sukses guna menjamin kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara (Ahyati, 2021).

Tingkat pendidikan sangat berkaitan erat dengan Tingkat Partisipasi Pasar Tenaga Kerja (TPAK). Jika tingkat pendidikan yang diselesaikan semakin tinggi, maka pekerja tersebut semakin siap memasuki pasar kerja dan semakin terbuka peluang baginya untuk memperoleh suatu jabatan tertentu dalam dunia usaha.

Pada hasil wawancara dengan warga kawasan Pasar Nalo, didapatkan beberapa generasi yang masih enggan untuk melanjutkan pendidikan wajib 12 tahun. Hal tersebut dikhawatirkan berpengaruh terhadap kualitas SDM masyarakat Pasar Nalo. Untuk mengatasi kemungkinan tersebut, dibutuhkan kesadaran yang tinggi dan edukasi secara menyeluruh terhadap warga Pasar Nalo mengenai pentingnya pendidikan untuk masa mendatang.

Pengaruh Pelayanan Akses Kesehatan yang Kurang Memadai terhadap Fenomena Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural juga dapat dipengaruhi oleh akses terhadap pelayanan kesehatan. Akses terhadap layanan kesehatan merupakan indikator untuk menilai keberhasilan suatu negara dari aspek pembangunan dan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, terutama terkait dengan penyedia layanan. Akses terhadap pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk pendapatan. Proses pengambilan suatu keputusan dipengaruhi oleh tingginya pendapatan rumah tangga masyarakat untuk mencari layanan kesehatan yang lebih baik agar dapat meningkatkan derajat kesehatannya. Menurut (Putro, et al., 2017) salah satu kendala bagi masyarakat adalah kesulitan ekonomi, termasuk mereka yang memiliki masalah kesehatan kronis, untuk mengakses layanan kesehatan tepat waktu yang memenuhi kebutuhan mereka.

Kualitas akses pelayanan kesehatan pada warga Pasar Nalo dapat dilihat dari bantuan dalam bidang kesehatan yaitu salah satunya adalah BPJS terutama kepada warga yang memiliki identitas yang berdomisili di wilayah tersebut.

Berikut merupakan cara mengatasi kemiskinan struktural yang terdapat di wilayah Pasar Nalo, sebagai berikut:

Bentuk Keterlibatan Pemerintah terhadap Pengentasan Kemiskinan Struktural

Terdapat program bantuan pemerintah yaitu program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Program ini memberikan bantuan tunai untuk memenuhi kebutuhan pokok kepada masyarakat miskin. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini pertama kali direalisasikan oleh pemerintah di tahun 2005 (Izzati dkk., 2020). Besaran belanja pemerintah pada BLT Dana Desa berkisar antara Rp 300.000-Rp 600.000 per dua bulan untuk rumah tangga miskin yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini terbebas dari pajak, sehingga pemerintah memberikan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat miskin

Pengaruh Kebijakan Pemerintah Terhadap Pengentasan Kemiskinan Struktural

Sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan, adanya kebijakan pemerintah melalui program bantuan kesehatan yaitu BPJS Kesehatan juga sangat

membantu masyarakat kurang mampu. Ulinuha (2014) BPJS adalah lembaga yang menyelenggarakan jaminan sosial. Oleh karena itu, keberadaan jaminan sosial membuat masyarakat dihadapkan pada risiko ekonomi. BPJS Kesehatan mulai beroperasi pada 1 Januari 2014. Operasional BPJS Kesehatan dimulai pada tahun 2011 ketika pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). PT Askes (Persero) telah direorganisasi menjadi BPJS Kesehatan, seiring ditunjuknya PT Askes (Persero) sebagai penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan.

Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Kualitas SDM Sebagai Bentuk Pengentasan Kemiskinan

Salah satu program yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah sebagai upaya meningkatkan kualitas SDM yaitu program pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan adalah proses pemberian kekuatan dalam bentuk pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepekaan terhadap pembangunan ekonomi, sosial dan politik. Sehingga, dapat mempunyai kesempatan untuk maju dan meningkatkan status di masyarakat (Kindervater dalam Anwar, 2016).

Pemberdayaan berarti masyarakat, khususnya kelompok rentan, mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, mempunyai akses bebas terhadap sumber-sumber produksi, dan meningkatkan pendapatan, barang, dan jasa untuk memperoleh apa yang dibutuhkan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, terdapat beberapa kesimpulan penting. Kemiskinan Struktural di Pasar Nalo, Pademangan, Jakarta Utara dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu klause upah rendah terhadap kemiskinan struktural, kesenjangan sosial tempat tinggal yang layak, pengaruh peningkatan sumber daya manusia terhadap tingkat ekonomi, pengaruh tingkat pendidikan terhadap TPAK, dan pengaruh pelayanan akses kesehatan yang kurang memadai terhadap fenomena kemiskinan struktural. Adapun upaya dalam mengatasi kemiskinan struktural di Pasar Nalo, Pademangan, Jakarta Utara adalah dengan keterlibatan pemerintah seperti program Bantuan Langsung Tunai (BLT), bantuan pelayanan kesehatan yaitu BPJS, dan kebijakan pemerintah sebagai upaya meningkatkan kualitas SDM yaitu program pemberdayaan masyarakat.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan keseluruhan dari narasumber tidak memiliki pekerjaan tetap dengan upah yang sangat minimum jauh dari yang telah ditetapkan pemerintah. Sebagai bagian dari upaya peningkatan perekonomian masyarakat di kawasan Pasar Nalo, program pemberdayaan sumber daya manusia berupa bimbingan dan bantuan pelatihan keterampilan di bidang teknis tertentu terus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan perusahaan. Hal ini menjadi landasan untuk meningkatkan kualitas dalam manajemen usaha. Pada hasil wawancara dengan warga kawasan Pasar Nalo, Pademangan, Jakarta Utara didapatkan beberapa generasi yang masih enggan untuk melanjutkan pendidikan wajib 12 tahun. Hal tersebut dikhawatirkan berpengaruh terhadap kualitas SDM masyarakat Pasar Nalo. Untuk mengatasi kemungkinan tersebut, dibutuhkan kesadaran yang tinggi dan edukasi secara menyeluruh terhadap warga Pasar Nalo mengenai pentingnya pendidikan untuk masa mendatang.

Pengungkapan

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Ahmad Hidayatullah, M.Pd, Ibu Ir. Yuliana Yuli W, MM., Bapak Mulyadi SH., MH, Bapak Suprima, S.Pd.I, M.Pd.I, Bapak RM. Andreas Bramantyo, SS, MHUM, dan Bapak Ronald Manulu, S.TH, MA selaku dosen pengampu Mata Kuliah Wajib Universitas.

REFERENSI

- Retnowati, E. (2011). Nelayan Indonesia Dalam Pusaran Kemiskinan Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi Dan Hukum). *Perspektif*, 16(3), 149. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i3.79>
- Armoyu, H. M. (2013). Pemberdayaan Pendidikan Islam Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan. *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan*, 11(2), 233. <https://doi.org/10.21154/cendekia.v11i2.278>
- Martati, I., . S., & Syarifuddin, A. (2013). Model Penciptaan Lapangan Kerja Melalui Pengembangan Ekonomi Lokal Pada Kecamatan Samarinda Ilir. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 15(2), 123–130. <https://doi.org/10.9744/jmk.15.2.123-130>
- Dewi, R., & Andrianus, H. F. (2021). Analisis pengaruh kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) terhadap kemiskinan di indonesia periode 2005-2015. *MENARA: Ilmu* , 15(2), 77–84.
- Murdiyana, M., & Mulyana, M. (2017). Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 10(1), 73–96. <https://doi.org/10.33701/jppdp.v10i1.384>
- ABDUL RAHMAN, N. F., & MUHAMMAD SHAH, N. S. (2020). Persepsi Penganut Muslim dan bukan Muslim terhadap Isu-Isu Sensitif Agama: Kajian di Lembah Klang. *International Journal of Islamic Thought*, 12(1), 95–109. <https://doi.org/10.24035/ijit.18.2020.185>
- Kawulur, S., Kolenangan, A. M., & C. Wauran, P. (2019). Analisa Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Desa dalam Menurunkan Tingkat Kemiskinan di 11 Kabupaten Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 19(No. 03), 107–117.
- Widiastuti, T. (2010). Kemiskinan Struktural Informasi. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(3), 314–329. www.pdfactory.com
- Firda Maulany, R., Ragil, S. D., & Eva, A. (2021). Indonesian Journal of Pharmacy and Natural Product Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akses Kesehatan. *Indonesian Journal of Pharmacy and Natural Product*, 04(May), 142–149. <http://jurnal.unw.ac.id/index.php/ijpnp>
- Pratama, Y. C. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia. *Esensi*, 4(2), 45–53. <https://doi.org/10.15408/ess.v4i2.1966>
- Mardiharto, M. (2019). Pembangunan Sumber Daya Manusia Melalui Bidang Pendidikan Agama Kristen. *PASCA: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen*, 15(2), 28–32. <https://doi.org/10.46494/psc.v15i2.56>
- Shafina, Tjut Dhien, M. (2003). *Membayar Upah Lebih Rendah Dari Upah Minimum*. 5(13), 1383–1398.
- Papilaya, J. (2020). KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN (Suatu Kajian Peranan Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan). *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Terapan*, 4(1), 77. <https://doi.org/10.30598/jbkt.v4i1.1113>

- Nafi, B. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Dapat Mempengaruhi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia (2016-2019). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(02), 953–960.
- Fadilah, M. F., & Basuki, M. U. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kerentanan Kemiskinan Relatif Di Kota Jakarta Barat Tahun 2018. *Diponegoro Journal of Economics*, 9(2), 168.
- Septina, R. (2018). Membangun Sumber Daya Manusia Berbasis Science Dan Teknologi. *Prosiding Seminar Nasional ...*, 477–481.
<https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/Prosidingpps/article/view/1917>